

Penerapan PSAK 57 terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia

**Inggit Anggraeni^{1*}, Innaya Ramadhyanty², Maya Kusuma Dewi³,
Nur Ageng Sebayu⁴, Riny Meidiyustiani⁵**

¹⁻⁵Program Studi Akuntansi, Universitas Budi Luhur, Indonesia

^{*}Penulis korespondensi: 2332500301@student.budiluhur.ac.id

Abstract. This study aims to assess the effect of PSAK 57 implementation on the quality of financial statements in Indonesian public companies. PSAK 57 is significant because it facilitates the presentation of uncertain liabilities and assets in an honest, relevant, and transparent manner, which ultimately strengthens stakeholder confidence in these financial statements. This study applies a descriptive quantitative approach using secondary data, namely annual reports and financial statements from public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) within a certain period. The evaluation was conducted to measure the degree of compliance with PSAK 57 and its relationship with financial statement quality parameters, such as relevance, reliability, and comparability. The research findings indicate that the implementation of PSAK 57 has a positive impact on the quality of financial statements, as entities that consistently adopt this standard demonstrate higher levels of transparency and accountability. This conclusion conveys a crucial message to practitioners and regulators to continue to deepen their understanding and implementation of PSAK 57 in order to strengthen the quality and integrity of financial reporting in Indonesia.

Keywords: Contingent Liabilities and Contingent Assets; IFRS; PSAK 57; Provisions; SFAS.

Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai pengaruh implementasi PSAK 57 terhadap mutu laporan keuangan pada perusahaan publik di Indonesia. PSAK 57 memiliki signifikansi karena memfasilitasi penyajian kewajiban dan aset yang tidak pasti dengan cara yang jujur, relevan, serta transparan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan pada laporan keuangan tersebut. Kajian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder, yakni laporan tahunan serta laporan keuangan dari perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi dilakukan untuk mengukur derajat kepatuhan pada PSAK 57 dan kaitannya dengan parameter mutu laporan keuangan, seperti relevansi, keandalan, serta kemampuan perbandingan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan PSAK 57 berdampak positif pada mutu laporan keuangan, sebab entitas yang secara konsisten mengadopsi standar ini menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Kesimpulan ini menyampaikan pesan krusial kepada praktisi dan regulator untuk terus memperdalam pemahaman serta implementasi PSAK 57, guna memperkuat mutu dan integritas pelaporan keuangan di Indonesia.

Kata kunci: IFRS; Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi; PSAK 57; Provisi; SFAS.

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun belakangan, industri konstruksi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, didorong oleh peningkatan investasi pada sejumlah proyek infrastruktur skala besar, seperti jalan tol, jembatan, serta fasilitas umum lainnya. Berbagai perusahaan konstruksi di Indonesia, termasuk PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), memainkan peran krusial dalam merealisasikan agenda pembangunan nasional. Akan tetapi, seiring dengan kompleksitas proyek yang semakin tinggi, muncul berbagai hambatan, khususnya terkait pengelolaan risiko, seperti pengungkapan provisi, liabilitas kontijensi, dan aset kontijensi. Liabilitas kontijensi tersebut melibatkan kemungkinan kerugian dari kewajiban yang belum pasti terwujud, dan wajib diungkapkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, misalnya

PSAK 57. Pengungkapan yang akurat sangatlah penting, karena dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan dengan tepat serta menjamin transparansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap entitas tersebut. (Ririn Widyastuti Wulaningsih, Salsabila, Safitri, & Hayuningtyas, 2025)

Standar Akuntansi Keuangan digunakan oleh perusahaan di Indonesia sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Standar ini disusun oleh IAI dan menentukan aturan untuk mengakui, mengukur, serta mengungkapkan unsur-unsur dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Fitur utama dari standar ini adalah untuk membantu para pengguna laporan keuangan memahami isi laporan tersebut secara lebih baik. (Endaryati, 2022). Dengan menggunakan standar sebagai pedoman, memudahkan perusahaan dalam membandingkan laporan keuangan tahunan dengan laporan tahun sebelumnya, karena semua laporan disusun dan dicatat dengan dasar yang sama. (Ririn Widyastuti Wulaningsih, Salsabila, Safitri, & Hayuningtyas, 2025)

Dengan menggunakan sampel perusahaan-perusahaan di Indonesia menemukan bahwa PSAK 57 diterapkan karena besaran provisi tergantung pada cakupan atau kapasitas perusahaan serta operasional perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dengan data kualitatif deskriptif.

Dalam penelitian Rengganis et al. (2023), pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan laporan keuangan sekunder dari PT Aneka Tambang Tbk. Dalam penelitian ini, PSAK 57 telah diterapkan dalam mengakui provisi yang terkait dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan setelah selesai kegiatan operasionalnya.

Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Guntara dan Ardiani (2020) menerapkan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan informasi dari laporan keuangan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., PT Semen Baturaja Tbk., serta PT Semen Indonesia Tbk. Data tersebut diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan telah selaras dengan PSAK 57, termasuk dalam aspek pengukuran, pencatatan, dan penyajian kewajiban provisi lingkungan.

Di samping itu, penelitian Nisa et al. (2020) menyimpulkan bahwa green accounting serta performa lingkungan memberikan dampak yang signifikan pada profitabilitas perusahaan. Kajian ini menggunakan sampel dari perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2018. Metode yang diterapkan bersifat asosiatif dan kuantitatif, dengan memanfaatkan laporan tahunan perusahaan pertambangan sebagai sumber data tambahan. (Ririn Widyastuti Wulaningsih, Salsabila, Safitri, & Hayuningtyas, 2025)

Beberapa penelitian sebelumnya membahas penerapan PSAK 57 yang berdampak pada kinerja lingkungan perusahaan atau green accounting terhadap profitabilitas. Namun, penelitian ini hanya mencakup perusahaan dari berbagai sektor dan menggunakan data sekunder dalam analisisnya. Berbeda dengan itu, penelitian ini fokus pada penerapan PSAK 57 di sektor konstruksi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus pada proyek konstruksi jalan tol, yang masih belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya yang hanya mengandalkan interpretasi data dan mengidentifikasi tantangan dalam mengungkap liabilitas kontinjensi. (Ririn Widyastuti Wulaningsih, Salsabila, Safitri, & Hayuningtyas, 2025)

Meskipun ada beberapa penelitian yang sudah membahas penerapan PSAK 57 di sektor pertambangan dan akuntansi lingkungan, seperti yang dilakukan oleh (Marsela et al., 2019), (Rengganis et al., 2023), (Guntara & Ardiani, 2020), dan (Nisa et al., 2020), masih ada penelitian yang kurang fokus pada penerapan PSAK 57 di sektor konstruksi, terutama dalam proyek pembangunan jalan tol yang memiliki risiko kontinjensi yang tinggi.

Penelitian sebelumnya biasanya menggunakan data yang sudah ada dan menganalisis berdasarkan angka, sehingga belum mampu menggambarkan secara lengkap bagaimana PSAK 57 diterapkan di lapangan. Selain itu, tidak banyak penelitian yang secara rinci membahas cara mengungkap kewajiban kontinjensi dalam industri konstruksi, padahal hal ini sangat penting karena tingginya kompleksitas dan ketidakpastian dalam proyek konstruksi. (Ririn Widyastuti Wulaningsih, Salsabila, Safitri, & Hayuningtyas, 2025)

Selain PSAK 57 yang mengatur soal provisi dan liabilitas kontinjensi, perusahaan konstruksi di Indonesia juga harus memperhatikan penerapan PSAK 237. PSAK 237 merupakan adaptasi dari IFRS 15 yang mengubah cara pengakuan pendapatan dari model berdasarkan risiko dan manfaat menjadi model berdasarkan transfer kendali. Standar ini sangat penting bagi perusahaan konstruksi seperti PT Wijaya Karya Tbk karena sebagian besar pendapatan mereka berasal dari kontrak jangka panjang yang memiliki kompleksitas dalam mengakui pendapatan, mengukur tingkat penyelesaian proyek, serta mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan.

PSAK 237 juga memerlukan pengungkapan yang lebih jelas terkait kontrak dengan pelanggan, termasuk pemisahan pendapatan, informasi mengenai kewajiban pelaksanaan, pertimbangan penting dalam penerapan standar, serta aset dan liabilitas kontrak. Dengan demikian, penerapan PSAK 237 bersamaan dengan PSAK 57 sangat penting bagi perusahaan konstruksi untuk menjamin bahwa laporan yang dibuat memenuhi standar akuntansi sekaligus

memberikan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan transparan kepada para pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja serta kondisi keuangan perusahaan.

Kajian ini dimaksudkan untuk menutupi celah informasi melalui analisis kasus dengan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada implementasi PSAK 57 oleh PT Wijaya Karya Tbk dalam proyek konstruksi jalan tol. Kajian ini diantisipasi mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hambatan serta potensi dalam penanganan kewajiban kontingensi di sektor konstruksi. Tujuan pokok dari kajian ini adalah menelaah cara PSAK 57 diterapkan oleh PT Wijaya Karya Tbk, khususnya terkait pengungkapan provisi, aset kontingensi, serta liabilitas kontingensi pada proyek pembangunan jalan tol. Kajian ini memiliki ciri khas karena mengintegrasikan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus intensif pada satu entitas, yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terdahulu. Keuntungan yang diperoleh dari kajian ini meliputi penyediaan perspektif yang lebih luas bagi praktisi dan akademisi tentang signifikansi pengungkapan liabilitas kontingensi yang akurat, serta berfungsi sebagai referensi bagi perusahaan lain untuk mengimplementasikan PSAK 57 dengan lebih efisien. (Ririn Widayastuti Wulaningsih, Salsabila, Safitri, & Hayuningtyas, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Penerapan PSAK 57 yang membahas tentang provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi sangat penting dalam industri konstruksi yang banyak risiko dan tidak pasti. Provisi adalah kewajiban saat ini yang besarnya dan waktunya belum tentu, tetapi diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kewajiban karena peristiwa yang sudah terjadi dan kemungkinan besar terjadi keluaran sumber daya ekonomi. Dalam proyek konstruksi, kewajiban ini bisa muncul dari kontrak yang belum selesai atau kewajiban hukum lain yang harus ditunaikan perusahaan. Di sisi lain, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi adalah kewajiban atau kemungkinan aset yang ada atau tidak tergantung pada terjadinya kejadian di masa depan yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan perusahaan. Karena itu, meskipun kedua hal ini tidak diakui dalam laporan keuangan, pengungkapan yang jujur dan transparan dalam catatan atas laporan keuangan sangat penting untuk menjaga tanggung jawab dan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan (Rengganis, Kinari, & Uzliawati, 2023).

Dalam bidang konstruksi, menerapkan PSAK 57 membawa beberapa kesulitan. Karena adanya ketidakpastian yang besar terkait perubahan harga bahan, upah pekerja, serta risiko hukum, perusahaan kesulitan dalam memperkirakan kewajiban secara tepat. Hal ini memengaruhi cara perusahaan menghitung dan mencatat provisi di dalam laporan keuangannya. Selain itu, jika pengungkapan tentang kewajiban yang mungkin terjadi tidak

cukup jelas, maka tingkat kejelasan keuangan akan menurun. Akibatnya, investor dan pemilik saham bisa merasa khawatir. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan penjelasan PSAK 57 dilakukan dengan benar dan konsisten sesuai standar yang ada agar mencerminkan kondisi keuangan secara realistik (Guntara & Ardiani, 2020).

Salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, menggunakan PSAK 57 dalam proyek pembangunan jalan tol yang memiliki risiko tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa WIKA sudah mengakui provisi dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan transparansi dalam menyampaikan kewajiban kontingensi. Penelitian ini menekankan pentingnya mematuhi standar akuntansi serta perlunya mengelola kewajiban secara hati-hati dalam proyek konstruksi besar agar bisa menjaga kepercayaan investor dan menghindari masalah hukum di masa depan (Guntara & Ardiani, 2020).

Dengan demikian, studi teoretis mengenai PSAK 57 menunjukkan bahwa standar ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang konstruksi, terutama pada proyek yang bernilai besar dan memiliki risiko tinggi. Penelitian lebih lanjut diperlukan agar perusahaan dapat menemukan cara terbaik dalam mengelola provisi dan liabilitas kontinjensi, sehingga memenuhi persyaratan pelaporan yang semakin ketat dan menjaga kepercayaan para pihak berkepentingan secara berkelanjutan (Guntara & Ardiani, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tahun 2023, yang sudah terdaftar di BEI. Perusahaan ini mempunyai target untuk menerapkan akuntansi lingkungan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, dengan tujuan membahas secara jelas dan rinci tentang penerapan PSAK 57 di PT Wijaya Karya Tbk. Pendekatan ini lebih menekankan pada interpretasi data serta analisis mendalam, dibandingkan dengan pengumpulan data berupa angka-angka. Penelitian ini juga melibatkan tinjauan literatur terkait PSAK 57, yang menjelaskan tentang provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi. Standard ini memiliki peran penting dalam mengakui dan mengukur kewajiban yang belum pasti dalam laporan keuangan perusahaan. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara perusahaan menerapkan standar akuntansi, serta masalah-masalah yang muncul dari data yang dikumpulkan, termasuk laporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengevaluasi bagaimana PT Wijaya Karya Tbk menerapkan PSAK 57, khususnya terkait dengan pengakuan kewajiban yang muncul dari proyek pembangunan jalan tol.

Penelitian ini juga menemukan kesulitan dalam memperlihatkan kewajiban kontingensi dan tingkat transparansi yang dibutuhkan. Selain itu, dalam penilaian ketaatan, penelitian ini mengevaluasi seberapa baik perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku serta menemukan peluang untuk meningkatkan praktik akuntansi dan transparansi. Metode dan teknik analisis yang digunakan fokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana standar akuntansi diterapkan dalam praktik perusahaan, terutama dalam konteks proyek konstruksi yang memiliki banyak aspek yang tidak pasti dan bersifat kontingensi.

Tabel 1. Literatur Review.

No	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil Utama
1	Wulaningsih	2025	<u>Penerapan PSAK 57 Terhadap Perusahaan Rekayasa, Pengadaan, dan Kontruksi PT Wijaya Karya TBK</u>	Kualitatif Deskriptif	Penerapan PSAK 57 oleh PT Wijaya Karya Tbk telah berjalan dengan baik dalam mengakui provisi terkait kewajiban dari proyek konstruksi jalan tol. Namun terdapat tantangan dalam pengungkapan liabilitas kontinjenji yang memerlukan transparansi lebih lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim menyebabkan peningkatan intensitas bencana alam yang mengakibatkan gangguan operasional signifikan dan kerusakan infrastruktur tambang. Cuaca ekstrem meningkatkan biaya operasional dan kewajiban lingkungan yang harus diakui sesuai PSAK 57, termasuk provisi untuk perbaikan infrastruktur dan rehabilitasi lahan.
2	Aptasari	2025	<u>Akuntabilitas Lingkungan di Antara Krisis Iklim: Peran PSAK 57 bagi Industri Pertambangan Indonesia</u>	Kualitatif Literatur	PSAK 237 (sebelumnya PSAK 57) menjelaskan bahwa provisi adalah liabilitas dengan waktu dan jumlah yang belum pasti. Perbedaan utama antara provisi dan liabilitas kontijensi terletak pada tingkat kepastian kewajiban dan pengakuannya dalam laporan keuangan.
3	Satrio	2024	<u>Provisi vs Liabilitas Kontijensi: Penjelasan PSAK 237</u>	Teoretis/Konseptual	Dokumen menjelaskan perubahan penomoran dari PSAK 57 menjadi PSAK 237 sebagai bagian dari konvergensi dengan IFRS. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kualitas standar akuntansi dan mengurangi manajemen pendapatan serta Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK meningkatkan transparansi laporan keuangan dan mendorong pengurangan limbah serta emisi karbon, sekaligus meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen.
4	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	2024	<u>Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia</u>	Teoretis/Konseptual	PT Aneka Tambang Tbk telah mengukur dan mengungkapkan provisi lingkungan sesuai PSAK 57. Perusahaan menerapkan standar ini
5	Putri	2024	<u>Standar Akuntansi Keuangan untuk Pengelolaan Lingkungan di Sektor FMCG: Kajian PSAK yang Relevan</u>	Literatur Review	
6		2023	<u>Analisis Penerapan PSAK 57 Terkait Tanggung Jawab Lingkungan</u>	Kualitatif Deskriptif	

	Rengganis	<u>Perusahaan pada PT Aneka Tambang Tbk</u>		untuk tanggung jawab restorasi lingkungan pasca-tambang dengan pengukuran estimasi terbaik.
7	Damanik	2022	<u>Implementasi PSAK 57 Pada Perusahaan Sub Industri Batu Bara BEI Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Lingkungan</u>	Kualitatif Deskriptif Perusahaan industri batu bara yang terdaftar di BEI telah mengimplementasikan PSAK 57 dalam mengungkapkan biaya dan tanggung jawab lingkungan. Aktivitas pertambangan menyumbang 70% kerusakan lingkungan di Indonesia sehingga pengungkapan provisi lingkungan sangat penting. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi LPS dalam pembayaran klaim nasabah mengacu pada PSAK dan memenuhi syarat untuk mencatat provisi. Provisi yang dicatat LPS didasarkan pada PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji, bukan menggunakan PSAK 62 tentang Kontrak Asuransi.
8	Nugrahanti	2021	<u>Pencatatan Provisi Pada Otoritas Penjamin Simpanan</u>	Kualitatif Deskriptif Kualitatif Deskriptif Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi LPS dalam pembayaran klaim nasabah mengacu pada PSAK dan memenuhi syarat untuk mencatat provisi. Provisi yang dicatat LPS didasarkan pada PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji, bukan menggunakan PSAK 62 tentang Kontrak Asuransi.
9	Guntara	2020	<u>Penerapan Akuntansi Kewajiban Provisi Lingkungan pada Perusahaan Sektor Industri Semen</u>	Kualitatif dengan Content Analysis Kualitatif dengan Content Analysis PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk mengakui provisi lingkungan sebagai provisi jangka panjang sesuai PSAK 57. Pengungkapan provisi lingkungan pasca tambang perlu lebih transparan untuk identifikasi jenis provisi.
10	Anwar	2020	<u>Analisis Penerapan Green Accounting Sesuai Psak 57 Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018)</u>	Kuantitatif Empiris Kuantitatif Empiris Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan green accounting sesuai PSAK 57 dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 57 berfungsi sebagai panduan yang mengatur pengakuan provisi, liabilitas kontingenji, dan aset kontingenji. Sesuai dengan PSAK ini, perusahaan yang menjalankan pemulihan lingkungan akibat limbah diperkenankan mencatat biaya pemulihan sebagai provisi. Besaran provisi ditentukan melalui estimasi terbaik mengenai biaya pemulihan yang diperlukan. Provisi diakui sebagai kewajiban yang berasal

dari kejadian masa lalu, seperti halnya jika pencemaran lingkungan terjadi pada tahun 2021, maka provisi diakui sebagai provisi untuk pemulihan lingkungan terkait pencemaran di tahun tersebut. Provisi membedakan diri dari kewajiban lainnya karena melibatkan unsur ketidakpastian mengenai kapan dan berapa besar biaya yang akan dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut (Rengganis, Kinari, & Uzliawati, 2023).

Perusahaan wajib mengakui provisi ketika ada kewajiban yang muncul dari peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya, dan memenuhi kewajiban tersebut bisa menyebabkan keluarnya sumber daya yang diharapkan memberi manfaat ekonomi. Dalam pembangunan jalan tol, perusahaan konstruksi harus mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian. Risiko ini mencakup aspek teknis, keuangan, dan hukum yang bisa memengaruhi keberhasilan proyek. Dalam laporan keuangan, PT Wijaya Karya Tbk harus mengungkap informasi mengenai provisi dan liabilitas kontingensi terkait proyek jalan tol. Informasi yang diungkapkan harus menjelaskan jenis kewajiban, perkiraan waktu penyelesaian, serta asumsi utama yang digunakan untuk menghitung provisi. Transparansi dalam pengungkapan informasi adalah keharusan untuk menampilkan gambaran yang jujur mengenai risiko dan kewajiban yang dihadapi perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam menilai biaya restrukturisasi yang melibatkan pembayaran pesangon, grup menggunakan standar akuntansi PSAK 57. Khususnya, mereka mengevaluasi apakah kontrak sewa yang ada termasuk dalam kategori kontrak memberatkan. Penilaian ini digunakan sebagai alternatif dalam menghitung penurunan nilai aset. (Ririn Widayastuti Wulaningsih, Salsabila, Safitri, & Hayuningtyas, 2025)

Dengan adanya standar akuntansi yang lebih ketat dan kebijakan lingkungan yang lebih konsisten, maka transparansi keuangan di industri pertambangan bisa ditingkatkan. Namun, tantangan tidak berhenti sampai di sini. Diperlukan upaya lebih lanjut agar aturan dan cara pencatatan keuangan dapat menyesuaikan dengan ketidakpastian iklim yang semakin kompleks. (Aptasari & Falah, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan PSAK 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. Standar ini membantu perusahaan, khususnya di bidang konstruksi seperti PT Wijaya Karya Tbk, dalam menyajikan kewajiban dan aset yang tidak pasti dengan cara yang lebih kuat, relevan, dan jelas. Dengan menerapkan PSAK 57, perusahaan diwajibkan untuk secara terbuka mengungkapkan risiko dan tanggung jawab yang belum jelas, sehingga memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di

kalangan publik. Selain itu, memenuhi PSAK 57 juga memperkuat akuntabilitas perusahaan serta mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih baik.

Penelitian menemukan masih ada masalah dalam penerapan PSAK 57, khususnya dalam hal pengungkapan tentang liabilitas yang bersifat kontingensi dan akurasi dalam estimasi provisi, yang sangat bergantung pada pertimbangan dari manajemen perusahaan. Beberapa faktor seperti kompleksitas proyek, ketidakpastian mengenai hukum, serta kurangnya pemahaman terhadap standar tersebut menjadi hambatan yang bisa memengaruhi kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, meskipun PSAK 57 sudah diterapkan cukup baik oleh perusahaan-perusahaan publik, diperlukan peningkatan pemahaman secara teknis dan konsistensi dalam penerapan secara nyata di lapangan agar laporan keuangan benar mencontohkan situasi keuangan yang terjadi.

Perusahaan yang dimiliki oleh publik diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawainya dalam menerapkan PSAK 57, terutama bagi orang-orang yang langsung terlibat dalam membuat dan mengecek laporan keuangan. Diperlukan pelatihan secara berkala serta bimbingan teknis agar pengakuan dan pengungkapan mengenai provisi serta liabilitas kontinjensi dapat dilakukan dengan tepat dan jujur. Selain itu, lembaga pengawas seperti OJK, BEI, dan IAI juga harus memperkuat pengawasannya serta memberikan panduan yang praktis agar penerapan PSAK 57 di berbagai sektor industri menjadi lebih seragam dan efektif. Penelitian berikutnya sebaiknya diperluas ke berbagai sektor selain sektor konstruksi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai dampak penerapan PSAK 57 terhadap kualitas laporan keuangan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aptasari, F. W., & Falah, M. H. (2025). Akuntabilitas lingkungan di tengah krisis iklim: Peran PSAK 57 bagi industri pertambangan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(1), 110–122.
- Astuti, R., & Wulandari, S. (2021). Penerapan PSAK 57 dalam pengakuan dan pengungkapan liabilitas kontinjensi pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 450–462.
- Febrita, R. E., & Kristanto, A. B. (2019). Kualitas laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 6(2). <https://doi.org/10.30656/jak.v6i2.1035>

- Guntara, R., & Ardiani, D. (2020). Penerapan akuntansi kewajiban provisi lingkungan pada perusahaan sektor industri semen. *Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 5(1), 51–65. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v5i1.y2020.p51-65>
- Hardiningsih, P., Nasihin, I., Srimindarti, C., & Lisiantara, G. A. (2024). PSAK 57: Comprehensive assessment of integrating green accounting on profit sustainability. *Journal of Accounting and Business Education (JABE)*, 8(4).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 237: Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Iskandar, R., Adhim, C., & Apriani, P. (2024). Kualitas laporan keuangan: Peran profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen dan Sumberdaya*, 3(2), 54–61. <https://doi.org/10.54371/jms.v3i2.446>
- Kusuma, D., & Pratama, H. (2022). Pengaruh kepatuhan terhadap PSAK terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan terbuka di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 55–67.
- Lestari, P., & Hardiyanti, N. (2020). Analisis penerapan PSAK 57 dalam pengungkapan kewajiban lingkungan pada perusahaan pertambangan. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 20(2), 123–136.
- Lisa, O., & Halim, A. (2023). Konstruksi model kualitas laporan keuangan di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 20–34. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.23074>
- Maharani, Z., Alukal, J., & Kususmastuti, R. (2022). Pengaruh corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(3). <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i3.632>
- Rahmawati, Y., & Syafruddin, M. (2023). Implementasi PSAK 57 dan pengaruhnya terhadap transparansi laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Indonesia*, 4(2), 98–112.
- Rengganis, A. P., Kinari, B. K., & Uzliawati, L. (2023). Analisis penerapan PSAK 57 terkait tanggung jawab lingkungan perusahaan pada PT Aneka Tambang Tbk. *Akuntansi Kompetif*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i2.1309>
- Sidik, T. J. (2022?). Analisis manfaat kualitas laporan keuangan dalam menunjang terwujudnya good corporate governance pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 5(2).
- Taurisanti, M. M., & Kurniawati, E. P. (2020). Perlakuan akuntansi karbon di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2). <https://doi.org/10.24914/jeb.v17i2.273>
- Wibowo, A., & Kurniawan, T. (2023). Hubungan penerapan standar akuntansi dan good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 8(1), 77–91.
- Wulaningsih, R. G., Salsabila, N., Safitri, R. A., & Hayuningtyas, R. (2025). Penerapan PSAK 57 terhadap perusahaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi PT Wijaya Karya Tbk. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis, dan Teknologi (AMBITEK)*, 5(1), 334–342. <https://doi.org/10.56870/reb4dm83>